

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berasal dari kata "didik", yang kemudian diawali dengan "me" menjadi "mendidik", yang berarti membesarkan dan mengajar. Agar siswa dapat mencapai tujuan mereka dan menjadi cukup dewasa untuk mengemban tanggung jawab hidup secara mandiri, bertanggung jawab, cerdas, dan bermoral, orang dewasa membekali mereka dengan pendidikan, yang juga merupakan upaya terencana dalam proses membimbing atau belajar bagi individu dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohaninya.. Pengembangan potensi seseorang disebut sebagai komponen pendidikan. Terdapat dua kategori pendidikan: formal dan informal. Pendidikan yang diterima melalui kurikulum terstruktur di sekolah atau lembaga pemerintah disebut pendidikan formal. Sebaliknya, pendidikan nonformal seringkali dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terkait dengan lembaga atau badan pemerintah tertentu. (Hidayat & Abdillah, 2019)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, “pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta budaya bangsa yang bermartabat. Pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, berpengetahuan luas, mandiri, dan menjadi orang yang bertanggung jawab.”

Dalam praktiknya Pendidikan memiliki beberapa masalah, salah satunya adalah manajemen yang tidak efisien yang terjadi ketika rencana tidak dipikirkan dengan matang atau keputusan jangka panjang tidak diperhitungkan. Hal ini menyebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah tidak efisien.

Karena semua kegiatan pendidikan berlangsung di sekolah, pendidikan sekolah merupakan area terkecil dalam manajemen pendidikan. Organisasi yang mengutamakan nirlaba atau berorientasi non laba dikenal sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga merupakan organisasi nirlaba yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka perlu mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan donatur lain yang tidak mengantisipasi pembayaran dari organisasi, sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 45 (2011). Di masa mendatang, uang yang diperoleh dari layanan publik dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya tambahan bagi suatu lembaga.

Setiap lembaga harus menyediakan layanan pendidikan yang efektif dan efisien untuk pembelajaran siswanya, lembaga pendidikan juga terikat erat dengan lingkungan kompetitif untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Teknik yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menyusun rencana pembelajaran yang dapat menghasilkan siswa berkualitas tinggi menjadi faktor keberhasilan ini. Namun, strategi menarik yang dibuat lembaga Pendidikan juga harus dibarengi dengan keefisienan biaya yang dibebankan kepada pelajar. Fenomena persaingan tersebut juga dapat terjadi pada lembaga Pendidikan berbasis swasta, dimana

Pendidikan swasta memiliki tata Kelola dan kebijakan sendiri dalam menjalankan aktivitasnya sehingga persaingan tersebut semakin kuat.

Pesantren adalah salah satu dari beberapa lembaga pendidikan di Indonesia yang secara eksplisit berfokus pada agama. Pesantren merupakan tempat para santri yang diajar oleh Kyai (pendidik) serta asrama berfungsi sebagai tempat tinggal para santri dan digunakan sebagai sumber daya pendidikan di masjid. (Purnomo, 2017)

Salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, adalah Pondok Pesantren Nurul Iman. KH. Saepudin (alm) mendirikan pondok pesantren ini pada tahun 1986. Selain itu, Pondok Pesantren Nurul Iman memiliki lembaga pendidikan resmi yang dikelola oleh pengurus terpisah, seperti RA, TK, MI, MTs, dan MA. Pondok pesantren Nurul Iman tentunya mempunyai banyak kegiatan belajar mengajar, dimulai dari kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Pendidikan formal maupun informal tercakup dalam kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Iman, dan banyak di antaranya bergantung pada infrastruktur, fasilitas, dan tenaga pengajar untuk menjalankannya.

Pondok Pesantren Nurul Iman harus menerapkan prosedur tata kelola yang baik karena merupakan lembaga swasta. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek utama tata kelola yang baik (*good governance*) yang menjadi landasan penyajian laporan pengelolaan keuangan. Data keuangan untuk publik dan pemerintah tercakup dalam laporan ini. Dengan menentukan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasi, manajemen dapat memberikan informasi biaya. Biaya-biaya tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP). RAPBP berisikan informasi sumber-

sumber biaya dan biaya-biaya yang dikeluarkan Pondok Pesantren. (Darussalam, 2020)

Menurut Supriyadi (2006) agar pondok pesantren dapat menjalankan operasionalnya dan sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan lembaga pendidikan itu sendiri, biaya pendidikan sangat penting dalam membantu pelaksanaan rencana dan program pondok. Meskipun biaya yang terlalu rendah terkadang dapat mengakibatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai, biaya yang terlalu tinggi juga dapat memengaruhi kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Oleh karena itu, pondok harus menyeimbangkan antara biaya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Selain itu, karena cakupannya yang luas, lembaga pendidikan mungkin kesulitan mengendalikan pengeluaran mereka. Saat menetapkan biaya, lembaga pendidikan memerlukan data biaya satuan untuk menjamin manajemen biaya yang efektif dan unggul.

Pesantren wajib menentukan biaya satuan, yang umumnya disebut sebagai biaya *Unit cost*. Selain itu, biaya satuan yang kita kenal yakni Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). SPP adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan biaya penunjang satuan di lembaga pendidikan. Tujuan penentuan biaya SPP ini adalah untuk memastikan berapa besar biaya yang harus dibayarkan setiap santri.

Metode *Activity Based Costing* Menurut Purwoadi (2015) “Penghitungan Biaya Berbasis Aktivitas dimana metode penghitungan biaya produksi atau penentuan suatu produk didasarkan pada aktivitas. Pendekatan akuntansi

pendidikan yang berfokus pada aktivitas jasa yang dilakukan adalah penerapan penghitungan biaya berbasis aktivitas di perusahaan jasa pendidikan.” Dalam perusahaan manufaktur dan perdagangan, pendekatan Penghitungan Biaya Berbasis Aktivitas juga dianggap sebagai cara yang handal untuk menghitung harga pokok penjualan. Namun, menurut Mulyadi (2003), “Penghitungan Biaya Berbasis Aktivitas merupakan sistem informasi biaya yang dapat digunakan di semua jenis bisnis, termasuk organisasi sektor publik dan nirlaba, perusahaan manufaktur, jasa, dan perdagangan.”

Studi Andika Saputra Popang, Winston Pontoh, dan Sintje Rondonuwu (2018) tentang penggunaan *Activity-Based Costing* (ABC) untuk menentukan biaya satuan pendidikan di The Bridge Manado mengungkapkan bahwa perbedaan antara biaya satuan yang ditentukan menggunakan ABC dan perhitungan langsung di The Bridge Manado menyebabkan kelebihan biaya dan kekurangan biaya. Jika tersedia lebih banyak, dana tersebut dapat digunakan untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen sangat penting untuk pengendalian biaya dan menjaga akuntabilitas keuangan di lembaga pendidikan. Selain itu, pentingnya pembiayaan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Memberikan akses data kepada para pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan lembaga pendidikan merupakan kriteria lain.

Keakuratan penentuan harga satuan untuk setiap siswa di seluruh program spesialisasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan *Activity-Based Costing*, menurut studi Hastaningtyas dan Latifah (2018). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kenaikan biaya hanya bergantung pada kesepakatan antara yayasan dan

sekolah. Menurut penelitian Ocky Satrya Wicaksono (2011), biaya pendidikan sekolah lebih besar dari pada yang ditentukan oleh pendekatan *Activity-Based Costing* (ABC). Hal ini disebabkan oleh kesalahan alokasi dana.

Menurut Purwoadi (2015) menunjukkan bahwa pendekatan *Activity-Based Costing* dan biaya yang ditentukan oleh sekolah berbeda. Temuan ini menunjukkan adanya *undercost*. Ketika biaya riil lebih rendah daripada yang ditentukan oleh pendekatan *Activity-Based Costing*, hal ini disebut *undercosting*.

Pondok Pesantren Nurul Iman menerapkan sistem pembayaran SPP sebagai salah satu sumber biaya yang digunakan, dimana akan diperhitungkan berdasarkan perlengkapan dan peralatan atau sarana dan prasarana apa saja yang akan di dapat dan jumlah santri yang masuk. Penerapan dan perhitungan SPP di pondok pesantren Nurul Iman ditentukan nominalnya oleh keluarga Pondok berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diketahui oleh keluarga pondok pesantren.

Dalam praktiknya, banyak pesantren masih menetapkan biaya SPP berdasarkan keputusan sepihak pihak yayasan tanpa melalui proses perhitungan biaya yang mendalam. Hal ini juga terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung, di mana besaran SPP ditentukan secara langsung oleh pengurus yayasan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan santri secara umum, kebutuhan operasional, dan perkiraan biaya yang sifatnya masih kasar. Cara penentuan yang demikian menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya: biaya SPP seringkali tidak mencerminkan penggunaan sumber daya secara nyata; kurang adanya transparansi dalam dasar penetapan biaya; dan potensi munculnya kesenjangan antara biaya yang dibebankan kepada santri dengan biaya operasional

sesungguhnya yang dikeluarkan oleh pesantren. Kondisi ini dapat berdampak pada keberlanjutan keuangan pesantren, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam perspektif manajemen biaya modern, metode tradisional yang hanya membagi total biaya secara rata kepada jumlah santri sudah tidak relevan untuk mencerminkan kompleksitas aktivitas pendidikan. Pesantren pada kenyataannya memiliki banyak aktivitas yang menyerap biaya berbeda, seperti kegiatan pembelajaran, pengasuhan, konsumsi, asrama, pemeliharaan sarana prasarana, hingga program ekstrakurikuler. Jika semua biaya tersebut hanya disatukan dan dibagi rata, maka hasilnya tidak mencerminkan keadilan biaya maupun keakuratan informasi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara (Purwanti, 2022) Biaya SPP pondok pesantren Nurul Iman pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp.400.000/bulan dan Rp.450.000/bulan. Terjadi kenaikan nominal sebesar Rp.50.000 yang disebabkan karena dirasa biaya untuk kos makan dan biaya listrik mengalami kekurangan. Namun bila dilihat berdasarkan aktivitas belum tentu kenaikan biaya Rp.50.000 ini berasal dari kurangnya biaya kos makan dan biaya listrik saja. Jika dilihat dari tahun 2020 dan 2021 banyak sekali SPP yang belum lunas bahkan ada yang tidak bayar. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi jalannya belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul Iman Cibaduyut.

Selain itu, sistem pencatatan yang masih sederhana dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi biaya serta kurangnya informasi. Sehingga, Pondok Pesantren Nurul Iman memerlukan data biaya yang terperinci dan jelas dalam

menentukan biaya SPP yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penentuan biaya tersebut dikenal sebagai metode *Activity Based Costing*.

Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) perlu dikaji dan dianalisis, karna biaya satuan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dana di sekolah atau pondok pesantren dan pemerataan dana yang dikeluarkan oleh sekolah atau pondok pesantren.

Sebagai alternatif, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, yakni Activity Based Costing (ABC) System. Metode ABC memberikan gambaran lebih akurat mengenai alokasi biaya karena setiap biaya ditelusuri berdasarkan aktivitas yang mengonsumsinya. Dengan demikian, biaya SPP yang ditetapkan akan lebih mencerminkan pemakaian sumber daya secara riil, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penerapan sistem ABC juga dapat menjadi solusi strategis bagi Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung dalam menghindari kesalahan perhitungan, mengurangi ketidakadilan pembebanan biaya, serta menjadi dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis biaya SPP sebagai salah satu sumber pendanaan pendidikan. Apabila pesantren dapat menetapkan biaya per santri secara tepat dan memberikan informasi biaya yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang biaya pendidikan yang dikeluarkan di pesantren, maka pendidikan akan berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada periode yang telah ditentukan yaitu periode 2021/2022.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Activity Based Costing System* (ABC) sebagai alternatif

dalam Menentukan Biaya SPP pada Pondok Pesantren (Penelitian di Pondok Pesantren Nurul Iman Cibaduyut Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan biaya SPP pada Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung?
2. Bagaimana penentuan biaya SPP berdasarkan *Activity Based Costing System* pada Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penentuan biaya SPP pada Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung.
2. Penentuan biaya SPP berdasarkan sistem *Activity Based Costing* pada Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan cara-cara berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Penelitian ini dapat membantu penulis memahami secara mendalam aplikasi teoretis dan praktis dari perhitungan biaya berbasis aktivitas.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pondok pesantren tentang perhitungan biaya, terutama yang menggunakan pendekatan

Perhitungan *Activity-based costing*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa mendatang yang akan melakukan penelitian terkait dalam penggunaan perhitungan biaya berbasis aktivitas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan:

a. Bagi Peneliti

Salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) adalah menyelesaikan studi ini, yang juga membantu penulis lebih memahami pendekatan Activity Based Costing.

b. Bagi Pondok Pesantren

Bagi lembaga atau instansi yang membidangi pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Nurul Iman Cibaduyut Kota Bandung, diharapkan dapat memperhatikan hasil penelitian ini agar perhitungan biaya pendidikan dapat dilakukan secara maksimal.